

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**PENGARUH AUDIT KINERJA TERHADAP PENERAPAN *GOOD
CORPORATE GOVERNANCE* PADA KAB. LUWU**

(Studi Kasus Inspektorat Kab.Luwu)

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

Oleh :

**Rahmawati, SE.,M.Si, AK
Andika Rusli, SE**

**NIDN : 0906027601
NIDN : 0909058103**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
MUHAMMADIYAH PALOPO**

Juni 2014

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU(Studi kasus inspektorat kab.Luwu)

Peneliti / Pelaksana
Nama Lengkap : RAHMAWATI SE.M.Si.Akt
NIDN : 0906027601
Jabatan Fungsional :
Program Studi : Akuntansi
Nomor HP : 081355428082
Surel (e-mail) : rahmawati345@yahoo.co.id


Anggota Peneliti (1)
Nama Lengkap : ANDIKA RUSLI S.E
NIDN : 0909058103
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggung Jawab :
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 12.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp. 14.850.000,00

Mengetahui
Ketua P3M

Palopo, 5 - 8 - 2014,
Ketua Peneliti,


(H.Halim Palatte, SE, M.Si)
NIP/NIK 20080047


(RAHMAWATI SE.M.Si.Akt)
NIP/NIK20020033

Menyetujui,
Ketua

(Safju, SE,MM)
NIP/NIK 19940008

PENGARUH AUDIT KINERJA TERHADAP PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA KAB. LUWU

(Studi Kasus Kantor Inspektorat Kab.Luwu)

**Rahmawati dan Andika Rusli
STIE Muhammadiyah Palopo**

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Audit Internal terhadap penerapan *good corporate governance* pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Auditor Internal pemerintah daerah yang ada di kantor Inspektorat kabupaten Luwu.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi linier sederhana yang diolah dengan software SPSS versi 18.

Keyword: Audit Internal, Auditor Internal, *good corporate governance*

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance.....	5
B. Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Peningkatan Efisiensi.....	6
C. Hubungan Audit Kinerja dalam Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> oleh Auditor Internal.....	11
D. Kerangka Pikir.....	12
E. Hipotesis.....	13
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	13
BAB 4. METODE PENELITIAN	13
A. Jenis Penelitian.....	13
B. Populasi dan Sampel	13
C. Metode Analisis Data	13
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN	14
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	34
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN	34
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

5.1. Deskripsi Jawaban Variabel Audit Keuangan.....	14
5.2. Deskripsi Jawaban Variabel Audit Kinerja	15
5.3. Deskripsi Jawaban Variabel Audit Kepatuhan	16
5.4. Deskripsi Jawaban Variabel Audit Sistem Informasi.....	17
5.5. Deskripsi Jawaban Variabel Good Corporate governance	19
5.6. Hasil Uji Validitas Audit Keuangan.....	20
5.7. Hasil Uji Validitas Audit Kinerja	21
5.8. Hasil Uji Validitas Audit Kepatuhan	21
5.9. Hasil Uji Validitas Audit nSistem Informasi	21
5.10. Hasil Uji Validitas Good Corporate governance.....	22
5.11. Hasil Uji Reliabilitas	23
5.12. Hasil Uji Multikolinearitas	26
5.13. Hasil Uji Regresi linear Berganda.....	28
5.14. Koefisien Determinasi	29
5.15. Hasil Uji Parsial.....	30
5.16. Hasil Pengujian Simultan	32

DAFTAR GAMBAR

PENDUKUAN

5.1. Grafik Histogram.....	24
5.2. Normal Probability Plot	23
5.3. Diagram Scatterplot.....	27

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang dilakukan setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah menyebabkan terjadinya pengalihan sebagian wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (UU No. 32/2004) tentang Pemerintah Daerah menegaskan kewenangan Pemda untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam pengalihan wewenang tersebut oleh pemerintah daerah yang terdapat dalam tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan (Prajogo, 2001). Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Suatu pemerintahan yang baik harus menjalankan roda pemerintahannya secara terbuka agar semua pihak yang berkepentingan dalam pemerintahan tersebut dapat berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan juga harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Dyah Setyaningrum (2012:2) akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah masih dalam taraf munculnya kesadaran pentingnya pertanggungjawaban, namun hal ini perlu dihargai sebagai bentuk kemajuan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Belum adanya kesadaran pemerintah untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah serta maraknya kasus-kasus hukum yang melibatkan manipulasi data akuntansi di instansi pemerintahan membuat resah masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik dan pentingnya suatu informasi akuntansi. Masyarakat menyadari adanya ketidakpuasan pengelolaan kekayaan negara yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja.

Terjadinya manipulasi atau kecurangan (*fraud*) data akuntansi pemerintah daerah yang banyak dilakukan oleh orang-orang dalam instansi pemerintah daerah menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Maraknya kasus-kasus demikian menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak terutama terhadap tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal *good corporate governance* yang sekali lagi mengakibatkan terungkapnya kenyataan bahwa mekanisme *good corporate governance* yang

baik belum diterapkan dalam pemerintah daerah. Peran Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem pemantauan, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur perkembangan yang dicapai Pemda.

Menurut Mardiasmo (2005: 189) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun dengan adanya otonomi daerah, informasi dan hasil kinerja pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu belum sepenuhnya merupakan hasil yang terbaik dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan peran dari auditor dalam melakukan audit atas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah melalui prosedur yang telah ditentukan.

Untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam melayani kepentingan masyarakat, maka perlu dilakukan audit kinerja. Audit Kinerja merupakan suatu audit yang objektif dan sistematis terhadap bukti-bukti untuk dapat melaksanakan penilaian secara independen atas kinerja suatu organisasi/perusahaan (Fibrianto Wahyu Nugroho, 2005:2). Audit Kinerja bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengaudit dan mendorong pencapaian tujuan secara efektif, efisien, dan ekonomis, memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab (Deputi Bidang Akuntan Negara, 2001: 2).

Penyelenggaraan audit kinerja instansi pemerintah daerah agar maksud dan tujuannya sesuai dengan kebutuhan bagi pihak yang membutuhkan dan informasi yang dibutuhkan secara objektif, biasanya dilakukan oleh pemeriksa intern pemerintah daerah dalam hal ini Inspektorat sebagai pengawas intern pemerintah daerah. Inspektorat merupakan instansi pemerintah daerah yang melakukan pemeriksaan dan mengawal kinerja Pemda tentang pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menciptakan *good corporate governance* yang baik.

Penelitian-penelitian yang terkait dengan faktor-faktor terciptanya *good governance* salah satunya pernah dilakukan oleh Dr. Leny Nofianti (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada dimensi audit kinerja atau audit operasional variabel pelaksanaan audit internal sektor publik yang diteliti, menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kinerja/operasional masih harus ditingkatkan hampir di semua SKPD (Satuan Kerja

Perangkat Daerah) di Provinsi Riau. Hasil yang diperoleh pada pelaksanaan audit kinerja/operasional bukan semata-mata kebenaran formal tapi adalah manfaatnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan akuntabilitas publik dalam kerangka mewujudkan *good governance*.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Latifa Agustin (2010) menyatakan bahwa kompetensi audit dan independensi audit berpengaruh signifikan terhadap efektivitas peran audit internal dalam mewujudkan *good corporate governance*. Sedangkan menurut Supriadi dkk (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa prinsip-prinsip *good governance* belum terlaksana sepenuhnya dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan - Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah. Dalam proses penyusunan RKA dan pelaksanaan kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa rencana kerja dan anggaran yang telah disusun tidak sepenuhnya dapat dijadikan pedoman untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja program/kegiatan.

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmini (2013) menyatakan bahwa kinerja pegawai dalam rangka mewujudkan *good governance* sudah berjalan baik hal itu bisa dilihat dari produktivitas yang didukung oleh kemampuan pegawai dalam mengatasi kesulitan dalam pelayanan yang cukup memuaskan masyarakat, kualitas pelayanan yang dimana pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan efisien dan responsivitas pegawai yang tanggap dalam mengatasi keluhan-keluhan masyarakat. Namun menurut Rusmini terdapat faktor penghambat mewujudkan *good governance* diantaranya ketidak disiplin pegawai. Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Fibrianto Wahyu Nugroho (2005:86) menyatakan bahwa BPKP melaksanakan Audit Kinerja secara independen untuk menilai keberhasilan atas kinerja BUMN/BUMD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sehingga dapat membantu manajemen auditan dalam mendorong pencapaian tujuan secara ekonomis, efisien, dan efektif, memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Mengacu dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dalam penelitian ini peneliti akhirnya menarik kesimpulan bahwa salah satu hal yang dapat mewujudkan *good corporate governance* yaitu dilihat dari kinerja dari setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, baik kinerja dalam hal pencapaian tujuan kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, pencapaian kinerja secara efisien, efektif, dan ekonomis, serta kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan untuk mengetahui apakah kinerja pemerintah sudah baik atau belum perlu dilakukannya audit kinerja oleh auditor internal

pemerintahan terkait apakah prinsip-prinsip yang terdapat dalam *good corporate governance* telah diterapkan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis akan menganalisis keefektifan penyelenggaraan audit kinerja untuk mewujudkan *good corporate governance* pada pemerintah daerah yang dilakukan oleh auditor internal dalam hal ini Inspektorat pemerintah daerah Kabupaten Luwu, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyajikannya dengan judul **"Pengaruh Audit Kinerja terhadap penerapan *Good Corporate Governance* Kabupaten Luwu"**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalahnya adalah: "Apakah Audit Internal berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance* pemerintah daerah Kabupaten Luwu?"

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Penerapan *Good Governance*

Akuntabilitas suatu instansi yang diwujudkan melalui implementasi SAKIP sangat penting terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan suatu usaha atau kegiatan yang spesifik akan dapat mencegah hilangnya sumber daya.

Unsur-unsur Auditing menurut Mulyadi (2002) yaitu antara lain:

- a) Suatu proses sistematis, artinya merupakan suatu langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi.
- b) Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya proses sistematis ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.
- c) Pernyataan tingkat kesesuaian, artinya pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- d) Kriteria yang telah ditetapkan, artinya kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan dapat berupa: (a) peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif, (b) anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan oleh manajemen, dan (c) prinsip akuntansi berterima umum (PABU) di Indonesia.
- e) Penyampaian hasil (atestasi), dimana penyampain hasil dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit (*audit report*)
- f) Pemakai yang berkepentingan, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan, misalnya pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor, organisasi buruh, kantor pelayanan pajak dan masyarakat umum yang memiliki kepentingan publik.

Ada empat jenis audit yang dikenal (Gondodiyoto, 2007 : 93) yaitu:

- 1) Audit Keuangan (*financial statement audit*) adalah audit terhadap laporan keuangan perusahaan atau organisasi pemerintahan yang akan menghasilkan opini pihak ketiga mengenai kesesuaian, ketepatan, dan kelengkapan laporan-laporan

tersebut. Audit keuangan umumnya dilaksanakan oleh perusahaan atau akuntan publik yang tidak menginduk pada yang lain yang harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

- 2) Audit operasional/ audit kinerja (*operational audit*) adalah pengkajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur operasi standar dan metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan (3E)
- 3) Audit kepatuhan (*compliance audit*) adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- 4) Audit sistem informasi (*information system audit*), audit TI merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang digunakan telah dapat melindungi aset milik organisasi, mampu menjaga integritas data, dapat membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif, serta menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien.

B. Pengaruh Audit Kinerja terhadap peningkatan efisiensi

Audit Kinerja bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengaudit dan mendorong pencapaian tujuan secara efektif, efisien, dan ekonomis, memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab (Deputi Bidang Akuntan Negara, 2001: 2).

Nofianti (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada dimensi audit kinerja atau audit operasional variabel pelaksanaan audit internal sektor publik yang diteliti, menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kinerja/operasional masih harus ditingkatkan hampir di semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Provinsi Riau. Hasil yang diperoleh pada pelaksanaan audit kinerja/operasional bukan semata-mata kebenaran formal tapi adalah manfaatnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan akuntabilitas publik dalam kerangka mewujudkan *good governance*.

Menurut Mardiasmo (2004:179) Audit kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, dengan harapan dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah

dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

Sedangkan menurut Indra Bastian (2006:57) Audit Kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan pemerintah yang diaudit.

Menurut Profesor Soemardjo Tjitrosidojo yang dikutip oleh I Gusti Agung Rai (2008:45) terdapat beberapa karakteristik dari audit kinerja, adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan operasional, dengan menggunakan perbandingan dengan cara pemeriksaan oleh dokter, haruslah merupakan pemeriksaan semacam "medical check up" (penelitian kesehatan), dan bukan merupakan pemeriksaan semacam "otopsi post mortem" (pemeriksaan mayat); jadi, pemeriksaan seharusnya dimaksudkan agar si pasien memperoleh petunjuk agar ia selanjutnya dapat hidup lebih sehat dan bukan sebagai pemeriksaan untuk menganalisis sebab-sebab kematian.
- b. Pemeriksaan haruslah wajar (*fair*), objektif dan realistis selain itu berfikir secara dinamis, konstruktif dan kreatif. Pemeriksaan pun harus dapat bertindak secara diplomatis.
- c. Pemeriksaan (atau setidaknya tim pemeriksa secara kolektif) harus mempunyai pengetahuan keterampilan dari berbagai macam bidang, seperti ekonomi, hukum, moneter, statistik, komputer, keinsinyuran dan sebagainya.
- d. Agar pemeriksaan dapat berhasil dengan baik, pemeriksa harus dapat berpikir dengan menggunakan sudut pandang pejabat pimpinan organisasi yang diperiksa selain itu pemeriksa harus benar-benar mengetahui persoalan yang dihadapinya, ia harus dapat mengantisipasi masalah serta cara penyelesaiannya dan memberikan gambaran tentang perbaikan-perbaikan yang dapat diterapkan dalam organisasi yang diperiksa.
- e. Pemeriksaan operasional harus dapat berfungsi sebagai suatu "early warning system" (sistem peringatan dini) agar pimpinan secara tepat pada waktunya, setidaknya belum terlambat dapat mengadakan tindakan-tindakan korektif yang mengarah pada perbaikan organisasinya.

Jenis Audit Kinerja

Evaluasi kinerja menurut PP 71 tahun 2010 adalah mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Basis Akuntansi adalah basis akrual baik LO maupun LRA.

Menurut Mardiasmo (2004:180) audit kinerja meliputi dua jenis, yaitu:

1. Audit Ekonomi dan Efisiensi

Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya (input). Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang ada dapat dicapai output yang maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan:

- a. Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang dan peralatan kantor) secara ekonomis dan efisien.
- b. Penyebab timbulnya inefisiensi atau pemborosan yang terjadi, termasuk ketidakcukupan sistem informasi manajemen, prosedur administratif, atau struktur organisasi.
- c. Apakah suatu entitas telah mematuhi peraturan yang terkait dengan pelaksanaan praktek ekonomi dan efisien.

Untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada periode bersangkutan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, kinerja tahun-tahun sebelumnya dan unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda.

2. Audit Efektivitas Program

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Audit efektivitas (audit program) bertujuan untuk:

- a. Tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan.
- b. Kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
- c. Apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.
- d. Apakah suatu entitas telah mematuhi peraturan yang terkait dengan pelaksanaan program.

Di Indonesia auditor pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Auditor Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan

negara diadakan satu badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Ayat (2) Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang tidak tunduk kepada pemerintah, sehingga diharapkan dapat bersikap independen.

2. Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen/LPND, dan Badan Pengawasan Daerah

The Auditing Practice Commite, yang merupakan cika bakal dari Auditing Practice Board, ditahun1980, memberikan ringkasan (*summary*) tanggung jawab auditor:

- a. Perencanaan, Pengendalian dan Pencatatan. Auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjaannya.
- b. Sistem Akuntansi. Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
- c. Bukti Audit. Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliable untuk memberikan kesimpulan rasional.
- d. Pengendalian intern. Bila auditor berharap untuk untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan *compliance test*.
- e. Meninjau Ulang Laporan Keuangan yang Relevan. Auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.

Makna dari *governance* dan *good governance* pada dasarnya tidak diatur dalam sebuah undang-undang, tetapi dapat dimaknai bahwa *governance* adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara atau management (pengelolaan) yang artinya kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Governance itu sendiri memiliki unsur kata kerja yaitu *governing* yang berarti fungsi pemerintah bersama intansi lain (LSM, swasta, dan warga negara) yang dilaksanakan secara seimbang dan partisipatif. Sedangkan *good governance* adalah tata pemerintahan yang baik atau menajalankan

fungsi pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain-lain). *Clean government* adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Berikut 10 prinsip yang mendasari *good governance* tersebut yaitu:

- 1) Partisipasi
Mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Penegakan Hukum
Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Transparansi
Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- 4) Kesetaraan
Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- 5) Daya Tanggap
Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
- 6) Wawasan Ke Depan
Membangun daerah berdasarkan ciri dan strategi yang jelas dan mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
- 7) Akuntabilitas
Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
- 8) Pengawasan
Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
- 9) Efisiensi dan Efektivitas
Menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan tanggung jawab.
- 10) Profesionalisme

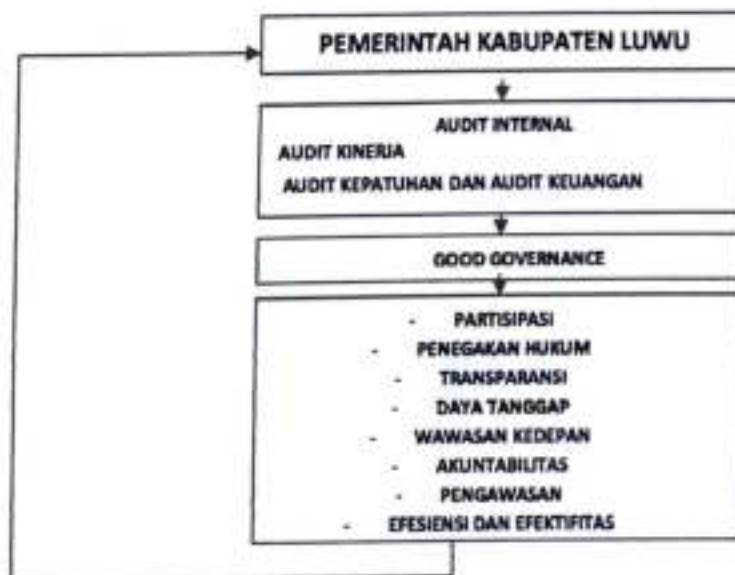
Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

C. Hubungan Audit Kinerja dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* oleh Auditor Internal

Pengendalian internal sangat penting bagi jalannya roda pemerintahan, terlebih lagi setelah adanya pengalihan sebagian wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah wajib untuk memberikan laporan pertanggung jawaban. Pengendalian internal bagi Pemda dilakukan oleh Inspektorat yang biasa disebut auditor internal Pemda dapat mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya kekayaan suatu daerah agar menjadi lebih baik demi diterapkannya *good corporate governance* yang baik.

Salah satu pengendalian internal yang biasa dilakukan inspektorat kepada Pemda agar tercipta *good corporate governance* adalah dengan mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi hasil kinerja Pemda dalam mengelola kekayaan daerah. Kegiatan pengendalian internal tersebut dilakukan oleh auditor internal untuk mengukur kinerja Pemda yang tugasnya biasa disebut dengan Audit Kinerja. Nofianti (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada dimensi audit kinerja atau audit operasional variabel pelaksanaan audit internal sektor publik yang diteliti, menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kinerja/operasional masih harus ditingkatkan hampir di semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Provinsi Riau. Hasil yang diperoleh pada pelaksanaan audit kinerja/operasional bukan semata-mata kebenaran formal tapi adalah manfaatnya.

D. KERANGKA PIKIR



E. HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: Diduga bahwa audit INTERNAL berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh Audit Internal terhadap penerapan *good corporate governance* pemerintah daerah Kabupaten Luwu”

BAB 4

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu peneliti mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan kuesioner. Dimana teknik pengumpulan informasi dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang sesuai untuk diajukan kepada para responden (masri dan Sofyan, 2005).

B. Populasi dan Sampel

Menurut Uma Sekaran (2006:121,123) populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi, sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh auditor internal pemerintah yang ada di Kantor Inspektorat Kabupaten Luwu.

C. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana dengan alat analisis *software* SPSS versi 18. Persamaan regresi linear sederhana ini mengandung makna bahwa dalam suatu persamaan regresi terdapat satu variabel

dependent dan satu variabel independent. Persamaan regresi linear sederhana dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b X$$

Dimana :

Y = *Good Governance*

X = Audit Internal

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

BAB 5
HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Variabel (X) Audit Internal

1. Deskripsi Data Variabel Audit Keuangan

Tabel 5.1
Deskripsi Jawaban Variabel variabel Keuangan

Item	STS	TS	N	S	SS	Total
1	0	0	3	7	4	14
2	0	1	0	11	2	14
3	0	0	0	10	4	14
4	0	0	3	4	7	14
Persentase	0,00	0,25	1,5	8	4,25	14

Data primer setelah diolah, 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk semua item pernyataan, responden menjawab setuju yang masing-masing persentasenya berturut-turut yaitu 7% responden menjawab setuju bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum, 11% responden menjawab setuju bahwa penyajian laporan keuangan telah memadai dan tepat waktu, 10% responden menjawab setuju bahwa kelengkapan laporan keuangan yang dihasilkan telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan 4% responden menjawab setuju bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan telah dilaksanakan oleh audit independen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tersebut.

Jadi berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 8% reponden menjawab setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu, 4,25% reponden

menjawab sangat setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu, 1,5% responden menjawab netral adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu dan 0,25 responden menjawab tidak setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu.

2. Deskripsi Data Variabel Audit Kinerja (X_2)

Tabel 5.2
Deskripsi Jawaban Variabel Audit Kinerja

Item	STS	TS	N	S	SS	Total
1	0	0	0	10	4	14
2	0	1	1	8	4	14
3	0	0	4	6	4	14
4	0	1	3	8	2	14
Persentase	0,00	0,5	2	8	3,5	14

Data primer setelah diolah, 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk semua item pernyataan, responden menjawab setuju yang masing-masing persentasenya berturut-turut yaitu 10% responden menjawab setuju bahwa prosedur operasi standar dan metode yang diterapkan suatu organisasi bertujuan untuk mengevaluasi efisien setiap bagian organisasi, 8% responden menjawab setuju bahwa prosedur operasi standar dan metode yang diterapkan suatu organisasi bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan keekonomisan setiap bagian organisasi, 2% responden menjawab setuju bahwa terdapat metode mengorganisir dan mengelola pekerjaan, termasuk mengelola keterampilan, kerjasama, inisiatif, pemberdayaan, inovasi sehingga selalu sesuai dengan apa yang dibutuhkan

organisasi telah disosialisasikan dan diterapkan dan 0,5% responden menjawab setuju bahwa auditor telah membandingkan output yang telah dicapai pada periode bersangkutan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, kinerja tahun-tahun sebelumnya dan unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda.

Jadi berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 8% reponden menjawab setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu, 3,5% reponden menjawab sangat setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu, 2% reponden menjawab netral adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu dan 0,5 reponden menjawab tidak setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu.

3. Deskripsi Data Variabel Audit Kepatuhan (X_3)

Tabel 5.3
Deskripsi Jawaban Variabel Audit Kepatuhan

Item	STS	TS	N	S	SS	Total
1	0	0	0	7	7	14
2	0	0	3	6	5	14
3	0	0	1	8	5	14
4	0	0	4	7	3	14
Persentase	0,00	0,00	2	7	5	14

Data primer setelah diolah, 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk semua item pernyataan, responden menjawab setuju yang masing-masing persentasenya

berturut-turut yaitu 7% responden menjawab setuju bahwa auditor internal melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap kepatuhan pegawai pada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan, 6% responden menjawab setuju bahwa auditor internal mengevaluasi kesesuaian aktivitas dengan hukum, regulasi dan standar yang berlaku, 8% responden menjawab setuju bahwa auditor internal mengevaluasi program dan kegiatan operasi apakah telah berfungsi sebagaimana mestinya dan memberi hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dan 7% responden menjawab setuju bahwa auditor internal memberi sumbangan pada proses tata kelola dan pengendalian.

Jadi berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7% reponden menjawab setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu, 5% reponden menjawab sangat setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu dan 2% reponden menjawab netral adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu.

4. Deskripsi Data Variabel Audit Sistem Informasi (X₄)

Tabel 5.4
Deskripsi Jawaban Variabel Audit Sistem

Item	STS	TS	N	S	SS	Total
1	0	1	2	8	3	14
2	0	3	4	5	2	14
3	1	0	3	7	3	14
4	2	0	0	8	4	14
Persentase	0,75	1	2,25	7	3	14

Data primer setelah diolah, 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk semua item pernyataan, responden menjawab setuju yang masing-masing persentasenya berturut-turut yaitu 8% responden menjawab setuju bahwa kegiatan audit internal di pemda Bapak/Tbu/Saudara adalah review terhadap keefektifan sistem informasi dan memastikan bahwa sistem tersebut berjalan sebagaimana yang diharapkan, 5% responden menjawab setuju bahwa pelaksanaan kegiatan audit internal terhadap sistem komputer yang digunakan adalah untuk melindungi aset milik organisasi, 7% responden menjawab setuju bahwa pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang digunakan mampu menjaga integritas data dan 8% responden menjawab setuju bahwa audit terhadap sistem komputer yang digunakan dapat membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif, serta menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien.

Jadi berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7% reponden menjawab setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu, 3% reponden menjawab sangat setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu, 2,25% reponden menjawab netral adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu, 1% reponden menjawab tidak setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu dan 0,75 reponden menjawab sangat tidak setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu.

b. Variabel (Y) Penerapan *Good Corporate Governance*

Tabel 5.5
Deskripsi Jawaban Variabel Penerapan *Good corporate Governance*

Item	STS	TS	N	S	SS	Total
1	0	2	5	4	3	14
2	2	1	2	7	2	14
3	0	1	1	11	1	14
4	0	2	2	6	4	14
5	0	1	0	10	3	14
6	0	0	2	8	4	14
7	0	0	3	7	4	14
Persentase	0,25	1	2,14	7,57	3	14

Data primer setelah diolah, 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk semua item pernyataan, responden menjawab setuju yang masing-masing persentasenya berturut-turut yaitu 4% responden menjawab setuju bahwa partisipasi: pemerintah Kabupaten Luwu bersama instansi lain telah melaksanakan fungsinya secara seimbang dan partisipatif, 7% responden menjawab setuju bahwa daya tanggap: pemerintah Kabupaten Luwu telah berperan meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali, 11% responden menjawab setuju bahwa transparansi: Pemerintah Kabupaten Luwu telah menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, 6% responden menjawab setuju bahwa wawasan kedepan: pembangunan daerah berdasarkan ciri dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut

bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya, 10% responden menjawab setuju bahwa akuntabilitas: Pemerintah Kabupaten Luwu telah meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, 8% responden menjawab setuju bahwa efektifitas dan efisien: Pemerintah Kabupaten Luwu telah menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan tanggung jawab dan 7% responden menjawab setuju bahwa profesionalisme: Pemerintah Kabupaten Luwu telah meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7,57% responden menjawab setuju bahwa adanya penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu.

3. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah pernyataan pada kuesioner yang telah diadarkan dapat mengukur variabel yang akan diukur. Untuk mengetahui validitas pernyataan dari setiap variabel, maka digunakan *correlation bivariate* dengan kriteria:

1. Jika $\text{sig. (2-tailed)} < 0,05 = \text{valid}$
2. Jika $\text{sig. (2-tailed)} > 0,05 = \text{tidak valid}$

1. Audit Keuangan

Tabel 5.6
Hasil Uji Validitas Variabel Audit Keuangan

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Significant</i>	Keterangan
Audit Keuangan 1	0,748**	0,002	Valid

Audit Keuangan 2	0,783**	0,001	Valid
Audit Keuangan 3	0,684**	0,007	Valid
Audit Keuangan 4	0,757**	0,002	Valid

Data primer setelah diolah, 2014

2. Audit Kinerja

Tabel 5.7
Hasil Uji Validitas Variabel Audit Kinerja

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Significant</i>	Keterangan
Audit Kinerja 1	0,767**	0,001	Valid
Audit Kinerja 2	0,868**	0,000	Valid
Audit Kinerja 3	0,842**	0,000	Valid
Audit Kinerja 4	0,880**	0,000	Valid

Data primer setelah diolah, 2014

3. Audit Kepatuhan

Tabel 5.8
Hasil Uji Validitas Variabel Audit Kinerja

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Significant</i>	Keterangan
Audit Kepatuhan 1	0,485**	0,079	Valid
Audit Kepatuhan 2	0,832**	0,000	Valid
Audit Kepatuhan 3	0,794**	0,001	Valid
Audit Kepatuhan 4	0,624**	0,017	Valid

Data primer setelah diolah, 2014

4. Audit Sistem Informasi

Tabel 5.9
Hasil Uji Validitas Variabel Audit Sistem Informasi

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Significant</i>	Keterangan
Audit Sistem Informasi 1	0,915**	0,000	Valid

Audit Sistem Informasi 2	0,959**	0,000	Valid
Audit Sistem Informasi 3	0,845**	0,000	Valid
Audit Sistem Informasi 5	0,721**	0,004	Valid

Data primer setelah diolah, 2014

5. *Good Corporate Governance*

Tabel 5.10
Hasil Uji Validitas Variabel *Good Corporate Governance*

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Significant</i>	Keterangan
Good Corporate Governance 1	0,768**	0,001	Valid
Good Corporate Governance 2	0,847**	0,000	Valid
Good Corporate Governance 3	0,537**	0,048	Valid
Good Corporate Governance 4	0,813**	0,000	Valid
Good Corporate Governance 5	0,631**	0,015	Valid
Good Corporate Governance 6	0,836**	0,000	Valid
Good Corporate Governance 7	0,784**	0,001	Valid

Data primer setelah diolah, 2014

Berdasarkan tabel uji validitas diatas variabel audit keuangan (X_1), audit kinerja (X_2), audit kepatuhan (X_3), audit sistem informasi (X_4) dan variabel *penerapan good corporate governance* (Y) di atas, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan untuk masing-masing variabel dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi untuk setiap pernyataan pada setiap variabel < 0,05 maka pernyataan dikatakan valid

Sesuai dengan tujuan dilakukannya uji validitas adalah untuk melihat seberapa besar kemampuan pernyataan dapat mengetahui jawaban responden.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan yang diajukan oleh peneliti dalam kuesioner yang dibagikan kepada responden dapat dijadikan sebagai alat ukur yang tepat.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian dan untuk mengukur apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas setiap variabel yaitu metode *Alpha Cronbach*. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai *alpha* > 0,60.

Tabel 5.11
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien <i>Alpha</i>	Keterangan
Audit keuangan	0,716	Reliabel
Audit Kinerja	0,850	Reliabel
Audit Kepatuhan	0,632	Reliabel
Audit Sistem Informasi	0,858	Reliabel
Good Corporate Governance	0,834	Reliabel

Data primer setelah diolah, 2014

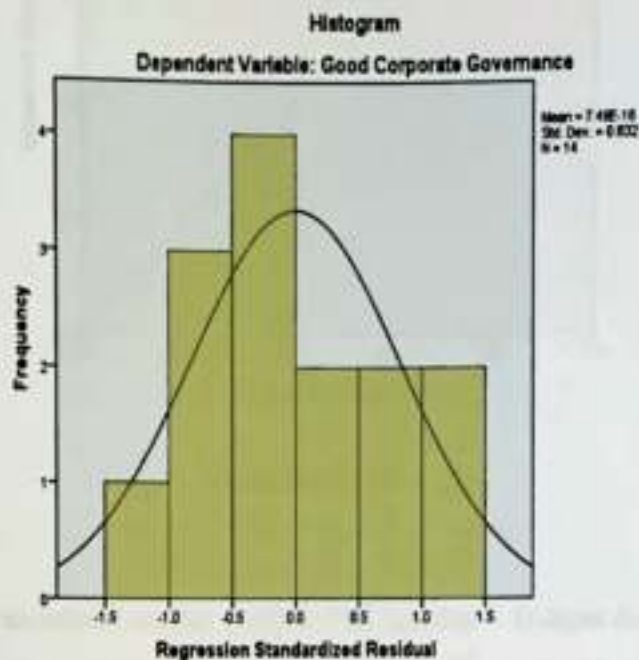
Dari hasil uji reliabilitas di atas, semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel atau handal karena menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien *Alpha* lebih dari 0,60 sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang handal atau dapat dipercaya.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah grafik histogram dan kurva penyebaran P-plot.

Gambar 5.1
Grafik Histogram

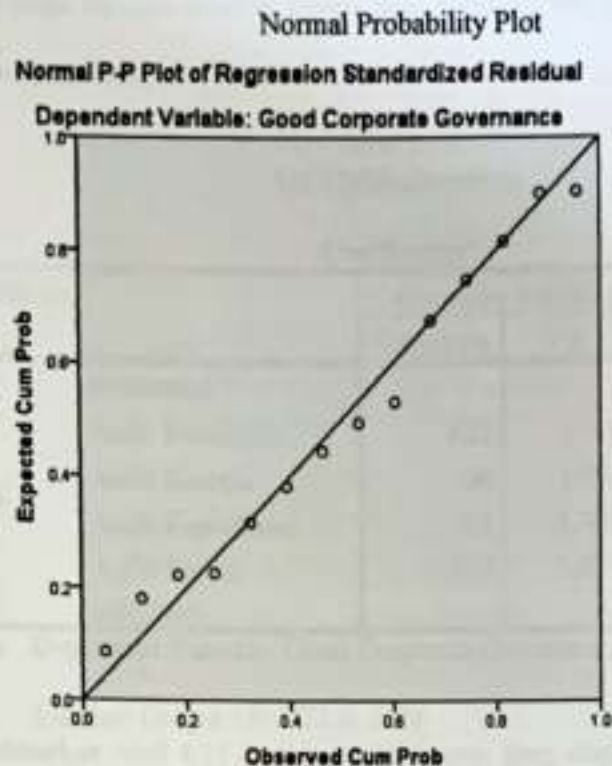


Sumber: Output SPSS 21.0, 2014

Dengan melihat grafik histogram, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang mendekati normal, hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal. Akan tetapi hasil dari grafik histogram ini tidak terlalu akurat apalagi ketika jumlah sampel yang digunakan kecil.

Metode lain yang dapat memberikan hasil untuk melihat apakah data terdistribusi normal adalah *normal probability plot*.

Gambar 5.2



Sumber:

Output SPSS 21.0, 2014

Berdasarkan tampilan grafik P-Plot (gambar 4.3) dapat disimpulkan bahwa terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Salah satu Metode yang di gunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, yaitu dengan melihat *tolerance value* atau nilai VIF (*Variant Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance value* dibawah 0,10 atau nilai

VIF diatas 10 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas yang lainnya.

Tabel 5.12
Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Audit Keuangan	.621	1.610
Audit Kinerja	.506	1.976
Audit Kepatuhan	.513	1.950
Audit Sistem Informasi	.619	1.617

a. Dependent Variable: Good Corporate Governance

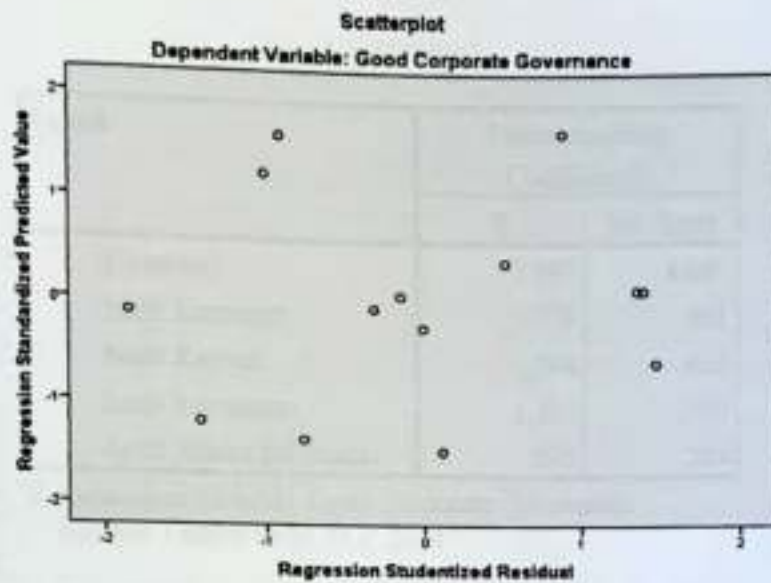
Sumber: Output SPSS 21.0, 2014

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, model regresi yang diajukan untuk variabel independen semuanya terbebas dari multikolinearitas. Ini terlihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF) masing-masing variabel independen memiliki VIF tidak lebih dari 10 dan *tolerance value* > 0,10, maka dapat dinyatakan model regresi linear berganda terbebas dari asumsi multikolinearitas dan variabel independen dapat digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas hasil kerja auditor.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2009:125). Untuk menguji ada tidaknya masalah heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat apakah terdapat pola tertentu pada grafik *scatterplot* berikut ini:

Gambar 5.3
Diagram Scatterplot



Sumber:

Output SPSS 21.0, 2014

Dari tampilan output SPSS grafik *scatterplot* terlihat bahwa data tersebar secara acak tanpa membentuk suatu pola tertentu serta titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, ini membuktikan tidak terjadi heterokedastisitas.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini terdapat perbedaan varians dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

C. Pengujian Hipotesis

1. Uji regresi Linear Berganda

Uji regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variable dependen. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variable dependen secara simultan dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda.

Tabel 5.13
Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	1.047	8.087
1 Audit Keuangan	-.573	.461
Audit Kinerja	.594	.422
Audit Kepatuhan	1.333	.559
Audit Sistem Informasi	.505	.263

a. Dependent Variable: Good Corporate Governance
Sumber: Output SPSS 21.0, 2014

Dari tabel di atas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,047 - 0,573X_1 + 0,594X_2 + 1,333X_3 + 0,505X_4$$

Dari persamaan regresi di atas, konstanta (a) adalah sebesar 1,047 hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel audit keuangan (X_1), audit kinerja (X_2), audit kepatuhan (X_3) dan audit sistem informasi (X_4) yang mempengaruhi, maka besarnya penerapan good corporate governance kabupaten Luwu 1,047. Sedangkan hasil uji regresi berganda untuk variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien audit keuangan (X_1) sebesar -0,573 berpengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu (Y). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan audit keuangan satu satuan maka variabel penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu sebesar 0,573 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain tetap.
2. Nilai koefisien audit kinerja (X_2) sebesar 0,594 berpengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu (Y). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan audit kinerja satu satuan maka variabel

penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu sebesar 0,594 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain tetap.

3. Nilai koefisien audit kepatuhan (X_3) sebesar 1,333 berpengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu (Y). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan audit kepatuhan satu satuan maka variabel penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu sebesar 1,333 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain tetap.
4. Nilai koefisien audit sistem informasi (X_3) sebesar 0,505 berpengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu (Y). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan audit sistem informasi satu kesatuan maka variabel penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu sebesar 0,505 dengan asumsi bahwa variabel independen tetap.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen, yaitu audit keuangan, audit kinerja, audit kepatuhan dan audit sistem informasi terhadap penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom *adjusted R square*, yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5.14
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.889 ^a	.791	.698	2.64758

a. Predictors: (Constant), Audit Sistem Informasi, Audit Keuangan, Audit Kepatuhan, Audit Kinerja

b. Dependent Variable: Good Corporate Governance

Sumber: Output SPSS 21.0, 2014

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien *adjusted R square* adalah sebesar 0,698 atau 69,8%. Maka disimpulkan bahwa variabel dependen yaitu penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu (Y) dipengaruhi oleh audit keuangan (X_1), audit kinerja (X_2), audit kepatuhan (X_3) dan audit sistem informasi (X_4). adalah sebesar 69,8%. Sedangkan sisanya 30,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Angka koefisien korelasi (R) pada tabel 4.19 sebesar 0,889 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah kuat karena memiliki nilai koefisien korelasi di atas 0,5.

3. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian regresi secara parsial (uji t) bertujuan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) dari masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05. Jika *p-value* lebih kecil dari 0,05 maka ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 5.15
Hasil Pengujian Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a				T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
(Constant)	1.047	8.087			.129	.900
Audit Keuangan	-.573	.461	-.240		-1.243	.245
Audit Kinerja	.594	.422	.301		1.406	.193
Audit Kepatuhan	1.333	.559	.507		2.383	.041
Audit Sistem Informasi	.505	.263	.372		1.921	.087

a. Dependent Variable: Good Corporate Governance

Sumber: Output SPSS 21.0, 2014

Hasil pengujian antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individu (parsial) yang dilakukan dengan uji t (tabel 4.20) adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis kedua menyatakan bahwa audit keuangan dari audit internal berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance* dari tabel 4.20 dapat diketahui bahwa hasil pengujian untuk variabel audit keuangan mempunyai probabilitas signifikansi 0,245 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H_2 ditolak, hal ini berarti bahwa audit keuangan dari audit internal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu.
2. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa audit kinerja dari audit internal berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance* dari tabel 4.20 dapat diketahui bahwa hasil pengujian untuk variabel audit kinerja mempunyai probabilitas signifikansi 0,193 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H_3 ditolak, hal ini berarti bahwa audit kinerja dari audit internal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu.
3. Hipotesis keempat menyatakan bahwa audit kepatuhan dari audit internal berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance* dari tabel 4.20 dapat diketahui bahwa hasil pengujian untuk variabel audit kepatuhan mempunyai probabilitas signifikansi 0,041 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_4 diterima, hal ini berarti bahwa audit kepatuhan dari audit internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu.

4. Hipotesis kelima menyatakan bahwa audit sistem informasi dari audit internal berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance* dari tabel 4.20 dapat diketahui bahwa hasil pengujian untuk variabel audit sistem informasi mempunyai probabilitas signifikansi 0,087 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H_5 ditolak, hal ini berarti bahwa audit sistem informasi dari audit internal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu.

4. Pengujian Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji F dengan taraf signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 5% maka terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.16
Hasil Pengujian Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	238.627	4	59.657	8.511	.004 ^b
Residual	63.087	9	7.010		
Total	301.714	13			

a. Dependent Variable: Good Corporate Governance

b. Predictors: (Constant), Audit Sistem Informasi, Audit Keuangan, Audit Kepatuhan, Audit Kinerja

Sumber: Output SPSS 21.0, 2014

Dari tabel 4.21 di atas diketahui hasil uji F menunjukkan bahwa F hitung adalah 8,511 dengan tingkat signifikansi 0,004. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari α ($0,004 < 0,05$) maka H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua

variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu. Hal ini berarti jika audit keuangan (X_1), audit kinerja (X_2), audit kepatuhan (X_3) dan audit sistem informasi (X_4) secara bersama-sama meningkat, maka penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu (Y) juga meningkat. Dan sebaliknya, jika audit keuangan (X_1), audit kinerja (X_2), audit kepatuhan (X_3) dan audit sistem informasi (X_4) secara bersama-sama menurun, maka penerapan *good corporate governance* (Y) juga akan menurun.

BAB 6

RENCANA DAN TAHAPAN BERIKUTNYA

Setelah penelitian ini penulis akan menyampaikan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah kabupaten Luwu sehingga menjadi referensi ilmiah untuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya audit internal di kabupaten Luwu. Selain itu penulis secara berkesinambungan akan terus melakukan penelitian-penelitian maupun pengabdian-pengabdian lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian diatas bahwa dengan adanya audit internal akan mendorong tercapainya penerapan *Good corporate Governance* dilingkup Inspektorat sehingga nanti secara garis besar nantinya akan mendorong tatakelola keuangan dilingkup pemerintah kabupaten akan berjalan dengan baik, meskipun banyak factor lain yang akan mendukung yang belum diteliti secara mendalam seperti karakteristik auditornya itu sendiri, etika auditor dan faktor lainnya.

Penelitian ini sesuai dengan teori (Prajogo,2001). Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Suatu pemerintahan yang baik harus menjalankan roda pemerintahannya secara terbuka agar semua pihak yang berkepentingan dalam pemerintahan tersebut dapat berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan juga harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Dyah Setyaningrum (2012:2) akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah masih dalam taraf munculnya kesadaran pentingnya pertanggungjawaban, namun hal ini perlu dihargai sebagai bentuk kemajuan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Belum adanya kesadaran pemerintah untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah serta maraknya kasus-

kasus hukum yang melibatkan manipulasi data akuntansi di instansi pemerintahan membuat resah masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik dan pentingnya suatu informasi akuntansi. Masyarakat menyadari adanya ketidakpuasan pengelolaan kekayaan negara yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja.

Menurut Mardiasmo (2005: 189) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun dengan adanya otonomi daerah, informasi dan hasil kinerja pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu belum sepenuhnya merupakan hasil yang terbaik dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan peran dari auditor dalam melakukan audit atas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah melalui prosedur yang telah ditentukan.

Untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam melayani kepentingan masyarakat, maka perlu dilakukan audit kinerja. Audit Kinerja merupakan suatu audit yang objektif dan sistematis terhadap bukti-bukti untuk dapat melaksanakan penilaian secara independen atas kinerja suatu organisasi/perusahaan (Fibrianto Wahyu Nugroho, 2005:2). Audit Kinerja bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengaudit dan mendorong pencapaian tujuan secara efektif, efisien, dan ekonomis, memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab (Deputi Bidang Akuntan Negara, 2001: 2).

Penyelenggaraan audit kinerja instansi pemerintah daerah agar maksud dan tujuannya sesuai dengan kebutuhan bagi pihak yang membutuhkan dan informasi yang dibutuhkan secara objektif, biasanya dilakukan oleh pemeriksa intern pemerintah daerah dalam hal ini Inspektorat sebagai pengawas intern pemerintah daerah. Inspektorat merupakan instansi pemerintah daerah yang melakukan pemeriksaan dan mengawal kinerja Pemda tentang pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menciptakan *good corporate governance* yang baik.

Penelitian-penelitian yang terkait dengan faktor-faktor terciptanya *good governance* salah satunya pernah dilakukan oleh Dr. Leny Nofianti (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada dimensi audit kinerja atau audit operasional variabel pelaksanaan audit internal sektor publik yang diteliti, menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kinerja/operasional masih harus ditingkatkan hampir di semua SKPD.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Latifa Agustin (2010) menyatakan bahwa kompetensi audit dan independensi audit berpengaruh signifikan terhadap efektivitas peran audit internal dalam mewujudkan *good corporate governance*. Sedangkan menurut Supriadi dkk (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa prinsip-prinsip *good governance* belum terlaksana sepenuhnya dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan - Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah. Dalam proses penyusunan RKA dan pelaksanaan kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa rencana kerja dan anggaran yang telah disusun tidak sepenuhnya dapat dijadikan pedoman untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja program/kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Latifa.2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Audit Internal Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.
- Arens, A.A., & Loebbecke, James K. 2003. *Auditing* :Pendekatan terpadu buku 1 & 2, (edisi ke 30), Alih bahasa Jusuf, A.A. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga. Jakarta
- BPKP.2001. *Pedoman Audit Kinerja BUMND*. Deputi Bidang Akuntan Negara. BPKP. Jakarta.
- BPKP. 2003. *Profil BPKP*. BPKP . Jakarta.
- Efendy, Muh. Taufik, 2010, Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motivasi auditor terhadap Kualitas Audit Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo). Tesis Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro, Tidak Dipublikasikan.
- F.Messier, William dan Margareth Boh. 2003. *Auditing and Assurance: A Systematic Approach*. Edisi 3. McGraw-Hill. USA.
- Gondodiyoto, Sanyoto.2007. *Audit Sistem Informasi: Pendekatan CobIT*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Halim, Abdul & Muh.Syam Kusufi.2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Howard, Leslie R. 2002. *Principles Of Auditing*. Jakarta.
- Kohler, Erick L. 2010. *Accounting For Management*. Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing)
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta
- Mardiasmo.2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Publisher. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mulyadi.2002. *Auditing Edisi Ke-6, Buku 1*. Penerbit Salemba Empat.
- Nofianti, Leny. 2012. *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah Daerah Mewujudkan Good Governance*. Berita Riaupos. Riau.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. Fokus Media.Jakarta
- Prajogo.2001. Perspektif Pemeriksa terhadap Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Departemen Akuntan Sektor Publik Ikatan Akuntan Indonesia. Vol.02 No.02. Agustus. pp. 1-8.
- Rusmini.2013. Kinerja Pegawai Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance* Di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir. Skripsi Universitas Mulawarman. Medan.
- Sedarmayanti. 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Bandung : Refika Aditama.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Method For Business*. Buku 1 dan 2. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyaningrum, Dyah.2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPK-RI. Skripsi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sukrisno, Agoes. (2002). *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) Oleh Kantor Akuntan Publik Jilid 1 edisi 3*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Supriadi, Sulkarnaen, Rusdiono.2012. Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Tesis Universitas Tanjungputa Pontianak. Pontianak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Wahyu Nugroho, Fibrianto.2005. Prosedur Pelaksanaan Audit Kinerja Pada BUMN/BUMD Di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah. Skripsi Universitas Semarang. Semarang.

**LAPORAN AKHIR
HIBAH KKN PPM**



**PENGOLAHAN RUMPUT LAUT KATONIK MENJADI SIRUP GARANGGANG DI
KELURAHAN SAMPODDO DAN TAKKALALLA KECAMATAN WARAS SELATAN
KOTA PALOPO**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

Oleh :

**RAHMAWATI SE., M.Si.Akt/NIDN. 0929127601 (Ketua Tim Pengusul)
ANDIKA RUSLI, S.E. /NIDN.0909058103 (Anggota Tim Pengusul)**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
MUHAMMADIYAH PALOPO
NOVEMBER 2015**


HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengolahan Rumput Laut Katonik menjadi Sirup
Garanggang di Kelurahan Sampoddo dan Takkalalla
Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : RAHMAWATI SE.M.Si.Akt
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Muhammadiyah Palopo
NIDN : 0906027601
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Akuntansi
Nomor HP : 081355428082
Alamat surel (e-mail) : rahmawati345@yahoo.co.id

Anggota (1)
Nama Lengkap : ANDIKA RUSLI S.E
NIDN : 0909058103
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo
Institusi Mitra (jika ada) : Kelompok Sampodo dan Takkalalla
Nama Institusi Mitra : Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo
Alamat : Hatijah dan Fatimah
Penanggung Jawab : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Tahun Pelaksanaan : Rp 60.000.000,00
Biaya Tahun Berjalan : Rp 60.108.000,00
Biaya Keseluruhan

Mengetahui,
Ketua P3M STIE Muhammadiyah Palopo



(DR. SAPAR, SE.M.Si)
NIP/NIK 20000027

Kota Palopo, 4 - 11 - 2015
Ketua,



(RAHMAWATI SE.M.Si.Akt)
NIP/NIK 20020033

Menyetujui,
Ketua STIE Muhammadiyah Palopo



(SALJU, SE.M.Si)
NIP/NIK 19940008

RINGKASAN

Tujuan program KKN-PPM ini adalah memberikan Value Added bagi petani rumput laut sehingga mereka dapat mengolah rumput laut menjadi berbagai macam olahan makanan dan minuman. Target khusus dari program KKN-PPM ini adalah memberikan motivasi dan keterampilan para petani dalam pengolahan rumput laut menjadi sirup serta pengetahuan dalam pengemasan dan penjualan produk hasil olahan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Metode yang digunakan dalam program KKN-PPM iniyakni dengan melakukan penyuluhan sekaligus pelatihan kepada masyarakat setempat tentang pengolahan rumput laut katonik menjadi sebuah produk yakni sirup rumput laut, serta memberikan pengetahuan tentang perhitungan harga pokok produk yang siap dijual

Kegiatan program KKN-PPM ini adalah Sosialisasi program KKN-PPM, dengan melakukan kerjasama dengan dua mitra yaitu dinas Koperindag untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat, Penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan, Operasionalisasi yang merupakan tahap penentu keberhasilan dari program KKN-PPM, serta Monitoring dan evaluasi program untuk menjamin keberlanjutan dan pengembangan dari program KKN-PPM ini. Berbagai kegiatan telah terlaksana dalam kegiatan ini, Rencana kegiatan yang telah dipersiapkan sebelumnya telah terlaksana berkat dukungan dan bantuan pihak civitas akademika STIE Muhammadiyah Palopo dan Koperindag Kota Palopo. Pada akhirnya sosialisasi dan pelatihan ini akan berdampak ke perekonomian masyarakat binaan.

Keywords: Pengolahan, rumput laut, sirup garanggang.

PRAKARTA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karna atas berkat dan rahmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan kemajuan pelaksanaan KKN PPM periode juni hingga juli 2014 di Kota Palopo ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan hasil ini merupakan pertanggungjawaban pelaksana dalam kegiatan KKN PPM yang telah di danai oleh DIKTI. Laporan berisi cakupan kegiatan yang telah dilaksanakan. yakni Pengolahan rumput laut katonik menjadi sirup garanggang. Terlaksananya program KKN PPM ini tak lepas dari dukungan para pihak antara lain mahasiswa, masyarakat, dinas koperindag, civitas akademika STIE Muhammadiyah Palopo, serta pihak lain yang telah mendukung kegiatan ini.

Kami menyadari kegiatan ini tidak sesempurna rencana awal namun, setidaknya pelaksanaan kegiatan yang telah ada dapat membantu masyarakat sekitar

Palopo, 26 Juni 2015

Rahmawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
PRAKARTA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Potensi Unggulan & Masalah di Masyarakat	1
1.2 Usulan Penyelesaian Permasalahan dan Cara Pemberdayaan Masyarakat	2
1.3 Teknologi/Metode/Kebijakan/Konsep yang akan digunakan.....	2
1.4 Profil Kelompok Sasaran beserta Potensi/Permasalahannya	3
BAB 2. TARGET DAN LUARAN	4
2.1 Target dan Luaran	4
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	5
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	5
3.2 Pelaksanaan	6
3.3 Rencana Keberlanjutan Program	7
BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	8
4.1 Kinerja Perguruan Tinggi	8
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN	9
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	10
DAFTAR PUSTAKA	11
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
Lampiran 1. Dokumentasi kegiatan KKN PPM	

DAFTAR TABEL

Tabel.1. Profil Kelompok sasaran KKN PPM beserta potensi dan permasalahannya

Tabel 2. Volume pekerjaan dalam bentuk Jam Kerja Efektif Mahasiswa KKN PPM

BAB I PENDAHULUAN

A. Potensi Unggulan & Masalah di Masyarakat

Salah satu komoditas unggulan kota Palopo adalah rumput laut. Kecamatan Wara Selatan adalah salah satu daerah yang mata pencaharian masyarakatnya adalah petani rumput laut. Rumput laut yang biasa juga disebut garanggang oleh masyarakat Palopo merupakan salah satu hasil pertanian yang dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman seperti dodol, keripik dan minuman (sirup). Masing-masing olahan memiliki keunikan pengolahan dan cita rasa. Dari sekian banyak produk yang dapat dihasilkan oleh komoditas rumput laut, yang paling berpotensi untuk diolah menjadi suatu produk yang berkualitas dan lebih mudah dalam pengolahannya yaitu sirup rumput laut. Sirup rumput laut merupakan sejenis minuman yang terbuat dari bahan baku utamanya adalah rumput laut serta campuran lain seperti gula pasir, buah sebagai perasa jeruk nipis, dan air.

Alga laut (*Eucheuina* sp.) merupakan salah satu sumberdaya alam hayati Indonesia. Tumbuhan ini mempunyai nilai ekonomis yang penting dalam industri kosmetik, pangan dan lain-lain. Rumput laut banyak diolah dalam bentuk kering setelah melalui proses penjemuran atau diolah menjadi makanan siap konsumsi, seperti: dodol, manisan dan minuman. Saat ini kebanyakan makanan siap konsumsi yang dijual masyarakat adalah minuman sari buah, tetapi untuk minuman dari rumput laut jarang ditemui dilingkungan masyarakat (Nursanto, 2004).

Kandungan dietary fiber dan nutrisinya bermanfaat sebagai antioksidan, antimutagenic, anti koagulan, anti tumor, dan metabolisme lipid. Rumput laut juga sebagai sumber iodium alami yang terbaik (Zada, 2009). Kandungan serat (diatery fiber) pada rumput laut bersifat untuk mengenyangkan dan memperlancar proses metabolisme tubuh, sehingga sangat baik dikonsumsi penderita obesitas. Karbohidratnya juga sukar dicerna, sehingga anda merasa kenyang lebih lama tanpa takut kegemukan (Anonim, 2010).

Unit usaha yang mengolah rumput laut menjadi suatu produk masih sangat jarang di kota Palopo khususnya dikecamatan Wara Selatan yang belum ada usaha pengolahan rumput laut secara langsung menjadi suatu produk yang lebih bermanfaat padahal yang berpotensi mendirikan usaha rumput laut adalah kecamatan Wara Selatan karena mayoritas masyarakatnya adalah petani rumput laut.

Pada Umumnya para petani rumput laut langsung menjual hasil panennya secara langsung baik yang masih basah maupun yang telah kering padahal jika diolah lebih lanjut usaha ini akan memberikan nilai tambah kepada para petani serta meningkatkan penghasilan mereka.

Hasil olahan rumput laut khususnya dalam hal ini adalah sirup rumput laut bias menjadi salah satu alternative olahan yang dapat di buat oleh masyarakat, hal ini di karenakan pembuatannya cukup mudah dan bahan-bahan yang dibutuhkan juga tidak sulit di peroleh.

B. Usulan Penyelesaian Permasalahan dan Cara Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peserta KKN-PPM di kecamatan Wara Selatan maka dapat disimpulkan dan disepakati beberapa pokok permasalahan diantaranya:

1. Rumput laut hanya di tanam, panen dan hasil panennya langsung dijual tetapi tidak diolah langsung menjadi suatu produk yang lebih bermanfaat khususnya diolah menjadi sirup rumput laut
2. Masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat mengenai cara mengolah rumput laut katonik menjadi suatu produk khususnya sirup rumput laut.
3. Selain itu belum ada unit usaha yang mengolah rumput laut menjadi suatu produk yakni sirup rumput laut.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut diatas, maka strategi yang ditetapkan untuk penyelesaian masalah tersebut yaitu:

1. Memberikan motivasi kepada masyarakat setempat dengan cara melakukan penyuluhan sekaligus pelatihan kepada masyarakat setempat tentang pengolahan rumput laut katonik menjadi sebuah produk yakni sirup rumput laut. Penyuluhan dan pelatihan ini dilakukan atas kerjasama peserta KKN-PPM dengan dua mitra yaitu dinas Koperindag kota Palopo dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan kota Palopo.
2. Mendirikan satu unit usaha yang mengolah rumput laut menjadi sirup rumput laut.serta memberikan pelatihan dalam manajemen pemasaran produk

C. Teknologi/Metode/Kebijakan/Konsep yang akan digunakan

Kegiatan ini akan dilakukan dengan dua mitra yaitu dinas Koperindag dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan kota Palopo. Dinas Koperindag Kota Palopo sendiri berperan dalam pembekalan pengetahuan dalam wirausaha masyarakat.Selain itu

masyarakat Kecamatan Wara Selatan khususnya para petani serta kelompok kelompok masyarakat sekitarnya akan diberdayakan dalam kegiatan ini.

Metode yang diterapkan yaitu dengan memberikan penyuluhan, pengetahuan serta keterampilan dalam pengolahan rumput laut baik dalam pembuatan maupun dalam aspek ekonomi.

D. Profil Kelompok Sasaran beserta Potensi/Permasalahannya

Tabel.1. Profil Kelompok sasaran KKN PPM beserta potensi dan permasalahannya

No.	Uraian	Keterangan	
		3	4
1.	Kelompok Tani	Sampoddo	Takkalalla
2.	Alamat	Jl. Purangi	Jl. Idrus Kambau
3.	Tahun Berdiri	2011	2010
4.	Ketua	Juriani	Diana
5.	Jumlah Anggota	5	8
6.	Bidang Usaha	Petani rumput laut	Petani rumput laut
7.	Potensi	1. Kecamatan Wara Selatan merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut 2. Peluang usaha untuk hasil olahan rumput laut masih sangat luas 3. Motivasi Masyarakat sangat tinggi untuk mengembangkan usaha olahan rumput laut.	1. Kecamatan Wara Selatan merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut 2. Peluang usaha untuk hasil olahan rumput laut masih sangat luas 3. Motivasi Masyarakat sangat tinggi untuk mengembangkan
8.	Permasalahan	1. Masih kurangnya keterampilan masyarakat dalam pengolahan rumput laut. 2. Pengetahuan tentang manajemen produksi dan pemasaran produk masih sangat kurang. 3. Tidak adanya unit usaha untuk mengembangkan usaha.	1. Masih kurangnya keterampilan masyarakat dalam pengolahan rumput laut. 2. Pengetahuan tentang manajemen produksi dan pemasaran produk masih sangat kurang. 3. Tidak adanya unit usaha untuk mengembangkan usaha.

BAB 2

TARGET DAN LUARAN

a. Target dan Luaran

KKN-PPM merupakan program yang dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang di rasakan secara langsung oleh masyarakat, sehingga program-program yang di lakukan dalam proses KKN-PPM dapat memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat setempat karena di mana dari berbagai program yang di laksanakan adalah program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Ada beberapa luaran yang dihasilkan dari program KKN-PPM yaitu mendirikan dan mengembangkan salah satu unit usaha yang mengolah rumput laut secara langsung menjadi suatu produk yaitu usaha sirup rumput laut dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Untuk keberlangsungan unit usaha tersebut maka produk yang dihasilkan diperkenalkan ke pasar dengan pemberian label dan kemasan yang menarik dilengkapi dengan kelayakan konsumsi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Selain luaran diatas, program KKN ini diharapkan dapat memberi dampak terhadap masyarakat. Diantaranya adalah:

1. Menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* bagi masyarakat
2. Peningkatan pengetahuan tentang pengolahan hasil pertanian secara langsung menjadi suatu produk yang lebih bermanfaat
3. Memberikan manfaat terhadap peningkatan perekonomian masyarakat secara permanen dan berkelanjutan.
4. Memberikan pengetahuan tentang perhitungan harga pokok produk yang siap dijual

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

A. Persiapan dan Pembekalan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setelah peserta KKN-PPM melakukan observasi maka solusi yang ditawarkan dalam program KKN-PPM ini adalah pendirian dan pengembangan unit usaha. Program KKN-PPM yang dilaksanakan ini merupakan penerapan ilmu pengetahuan yaitu tata cara pengolahan rumput laut secara langsung menjadi sirup rumput laut serta teknologi proses, pengepakan/kemasan dan label serta pembinaan manajemen pemasaran produk dan strategi penjualan Sirup Rumput Laut. Adapun cara pengolahan rumput laut menjadi sirup rumput laut yaitu:

Alat dan Bahan:

- Rumput laut katonik dengan umur >45 hari
- Gula pasir
- Buah sebagai perasa (Jeruk)
- Jeruk nipis
- Kapur sirih
- Penyaring (Kain Putih)
- Air
- Kompor
- Wajan
- Panci

Cara Membuat:

- Rendam rumput laut dengan kapur sirih sampai mengembang agar baunya hilang.
- Kupas buah jeruk dan pisahkan dari bijinya jangan sampai ada biji yang tersisah agar tidak pahit
- Blender buah jeruk
- Blender rumput laut yang sudah direndam dan telah mengembang kemudian masukkan air jeruk nipis secukupnya
- Masak buah jeruk yang sudah di blender kemudian disaring
- Masak rumput laut yang sudah di blender kemudian disaring
- Campurkan buah jeruk yang sudah disaring dengan rumput laut yang sudah disaring kedalam panci kemudian masukkan gula pasir sebanyak 1 Kg dengan air sebanyak 600 mL. Kemudian masak hingga matang dan gulanya larut
- Setelah masak saring kembali dan masukkan kedalam botol.

Hal ini sangat penting karena permasalahan yang dihadapi masyarakat disebabkan karena minimnya pengetahuan dan peralatan untuk menunjang proses produksi.

Pengepakan/kemasan produk perlu yang berkualitas agar kualitas produk juga bagus. Labeling adalah tampilan awal yang dilihat oleh konsumen atau calon konsumen, sehingga untuk menarik minat konsumen perlu label yang menarik.

B. Pelaksanaan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan program KKN-PPM ini adalah:

1. Sosialisasi program KKN-PPM
2. Kerjasama dengan dua mitra yaitu dinas Koperindag dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan kota Palopo untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat
3. Penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan
4. Operasionalisasi yang merupakan tahap penentu keberhasilan dari program KKN-PPM
5. Monitoring dan evaluasi program untuk menjamin keberlanjutan dan pengembangan dari program KKN-PPM ini.

Pelaksanaan program kegiatan KKN-PPM ini terlaksana dengan baik melalui kerjasama dan partisipasi dari masyarakat serta beberapa mitra yang terlibat. Selain partisipasi sebagai kelompok sasaran atau peserta dalam pelatihan yang akan dilaksanakan dalam program KKN-PPM ini. Masyarakat dan mitra juga berpartisipasi dalam hal penyiapan alat dan bahan pengolahan yang tersedia dilokasi.

Volume pekerjaan dalam bentuk Jam Kerja Efektif Mahasiswa KKN PPM digambarkan dalam table 2 dibawah ini :

Tabel 2. Volume pekerjaan dalam bentuk Jam Kerja Efektif Mahasiswa KKN PPM

No.	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)	Keterangan
1.	Sosialisasi program KKN-PPM	a. Sosialisasi dan Seminar Program Kerja b. Pemilihan kelompok tani	60 x 6 jam 60 x 6 jam	
2.	Kerjasama dengan dua mitra yaitu dinas Koperindag dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan kota Palopo	a. Undangan kelompok tani b. Penyuluhan dan persiapan praktek pengolahan rumput laut.	60 x 6 jam 60 x 12 jam	
3.	Penyiapan sarana dan prasarana	a. Pembelian bahan dan Pembelian peralatan b. Penyiapan tempat produksi	60 x 6 jam 60 x 30 jam	
4.	Operasionalisasi	a. Pelatihan Pengolahan bersama	60 x 30 jam	

		koperindag	
		b. Pelatihan Perhitungan Biaya Produk	60 x 12 jam
		c. Pelatihan Pemasaran Produk	60 x 12 jam
5.	Monitoring dan Evaluasi	a. Evaluasi tim pelaksana	60 x 30 jam
Total Volume kegiatan			60 x 150 JKEM

C. Rencana Keberlanjutan Program

Program ini merupakan bentuk pengabdian Perguruan Tinggi kepada masyarakat, dengan terealisasinya kegiatan ini, masyarakat dapat meneruskan usaha pengolahan rumput laut ini berdasarkan kemampuan serta keterampilan yang telah di berikan sehingga akan menambah penghasilan masyarakat setempat. Dan jika memungkinkan pengolahan rumput laut dapat dikembangkan untuk produk olahan lainnya seperti kerupuk, dodol, dan lain-lain.

BAB 4

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1. Kinerja Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo merupakan suatu Institusi Pendidikan tinggi yang aktif dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat sebagai salah satu program Tri dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan program pengabdian masyarakat ini dikoordinir satu lembaga yaitu unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palopo (STIEM Palopo). Program KKN-PPM ini dilaksanakan oleh Tim Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo dan mahasiswa KKN-PPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo.

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program KKN PPM seperti tujuan awal peneliti untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian mereka. Kerjasama dengan masyarakat dengan pihak mitra dilakukan dalam rangka kelancaran program ini. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dengan bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak yakni civitas akademika STIE Muhammadiyah Palopo, Masyarakat maupun pemerintah Kota Palopo yang diwakili Dinas Koperindag. Adapun hasil yang di capai dalam program ini antara lain :

1. Pembentukan kelompok-kelompok mahasiswa dalam rangka pelaksanaan program KKN PPM ini,
2. Terlaksananya pembentukan kelompok –kelompok masyarakat yang akan dibina dalam rangka pelaksanaan program
3. Terlaksananya pelatihan kepada kelompok masyarakat setempat tentang pengolahan rumput laut katonik menjadi sebuah produk yakni sirup rumput laut. Penyuluhan dan pelatihan ini dilakukan atas kerjasama peserta KKN-PPM dengan dinas Koperindag kota Palopo. Pelaksanaan ini disertai dengan pelatihan pembuatan sirup rumput laut.
4. Pembentukan unit usaha di kelompok masyarakat dengan menyediakan peralatan dalam membuat sirup rumput laut serta peralatan penunjang lain seperti wadah plastik dan botol, serta mesin yang membantu dalam pengemasan sirup rumput laut agar menarik dan layak jual.
5. Pembuatan laporan kemajuan KKN PPM dan pelaksanaan Monitoring Internal
6. Monitoring dan evaluasi kelanjutan usaha yang dilakukan oleh mitra binaan atas pelatihan yang telah diberikan sebelumnya.
7. Persiapan publikasi dan monev eksternal.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

Program KKN PPM menjadi wadah dalam rangka mewujudkan tri darma perguruan tinggi. Dimana perguruan tinggi dapat menjadi mitra bagi masyarakat. Salah satu fungsinya adalah membantu masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Melalui program ini tim serta kelompok mahasiswa memberikan pelatihan dan penyuluhan dalam rangka pengelolaan/ pembuatan sirup rumput laut.

Terlaksananya program ini tentunya dengan bantuan dari pihak koperindag dan perguruan tinggi yang mendukung penuh. Mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaannya. Persiapan telah dilakukan jauh sebelumnya namun untuk pelaksanaannya dilakukan setelah penandatanganan kontrak dengan dikti/ pihak kopertis yakni pada juni 2015. Pada laporan akhir ini telah tercapai beberapa hasil yang sebelumnya dijelaskan di bab 5. Pihak kami mengharapkan dengan tercapainya beberapa kegiatan tersebut dapat member manfaat bagi masyarakat, mahasiswa maupun bagi penulis sendiri.

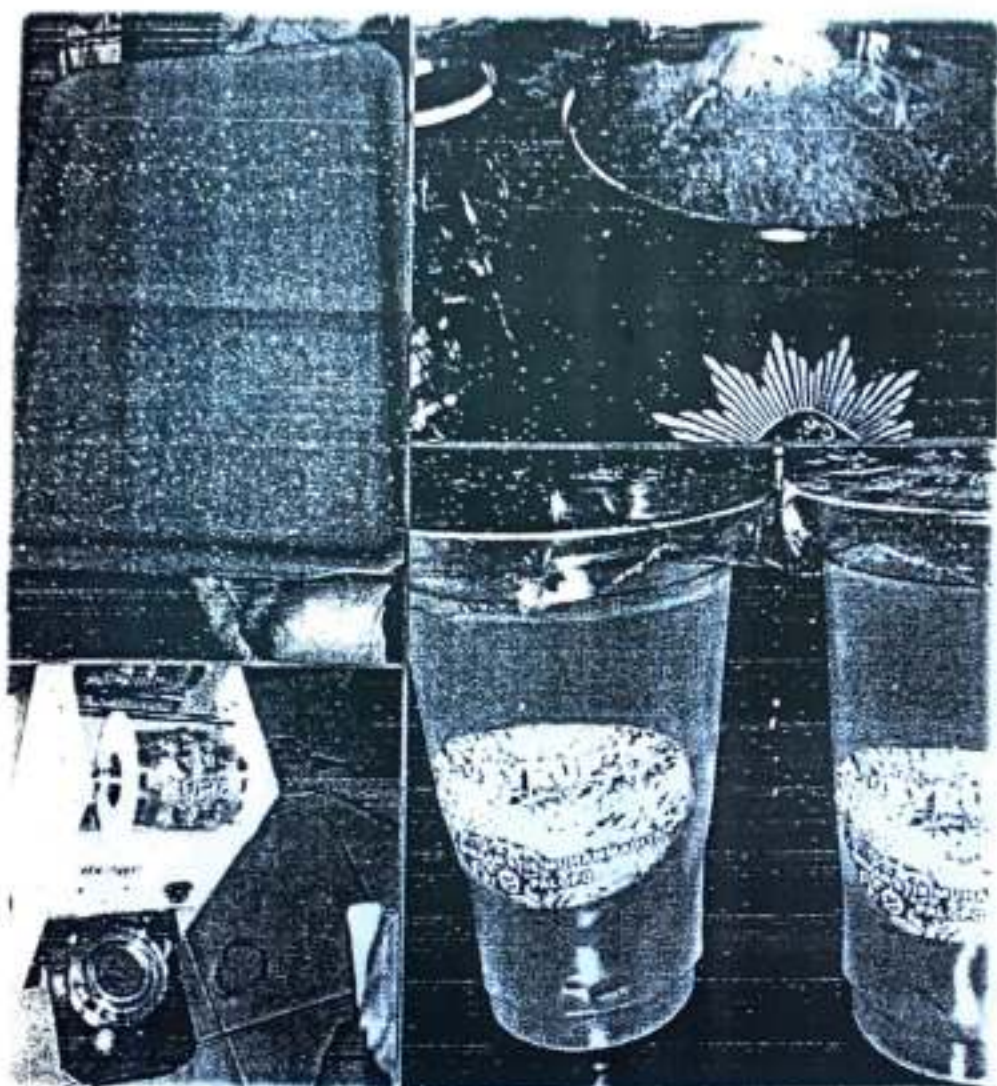
Adapun saran yang di bisa diberikan yakni, dengan program-program selanjutnya dapat di kembangkan sesuatu yang tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat atau yang langsung menyentuh ke masyarakat setempat khususnya untuk skim pengabdian. Dengan begitu fungsi Perguruan Tinggi bukan hanya sebagai akademik namun juga berguna dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Istiani, S, Zalnika A, Suhaimi, dan Anggadireja J. *Manfaat dan Pengolahan Rumput Laut*. Jurnal Penelitian. Jakarta: BPPT
- Wibowo Lukas, Evi Fitriyani, *Pengolahan Rumput Laut (Eucheuma Cottoni) Menjadi Serbuk Minuman Instan*, 2012, Jurnal Penelitian, Pontianak
- Anggadiredja, T., Zalnika, A., Purwoto, H., dan Istini, S. (2010). *Rumput Laut*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Indriani, H. dan Sumiarsih, E. (1999). *Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Rumput laut*. Jakarta: Penebar Swadaya. Hal. 43
- Winarno. (1990). *Teknik Pengolahan Rumput Laut*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Anonim, <http://aryacorrec.blogspot.com/> di akses tanggal 18 April 2014
- Anonim, <http://www.palopokota.go.id/> di akses tanggal 17 April 2014

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan KKN PPM





SYRUP
GARANGGANG
BINAAN, STIEM, AMMADIYAH
PALOPO





PEMBINAAN KEWIRAUSAHAAN

"Produksi Syrop Garanggang"





2nd International Conference on Commerce, Financial Markets and
Corporate Governance (ICCFMCG-2015)
Penang, Malaysia, Dec 19-20, 2015

Rahmawati, SE, Andika Rusli, Perabavathi Sinnasamy
Accounting, STIE Muhammadiyah Palopo, Indonesia
Accounting, Universiti Utara Malaysia, Malaysia

Dated: November 18, 2015

Ref: ICCFMCG-15-219

Subject: **Acceptance Letter**

Dear Sir (s)/Madam (s)

Congratulations! We are pleased to inform you that based on peer review process your submission entitled: **Effective and Efficiency Program Processing Katonik for Support Community of Entrepreneurship** has been accepted for oral presentation at 2nd International Conference on Commerce, Financial Markets and Corporate Governance (ICCFMCG-2015). Conference will be held at Rainbow Paradise Beach Resort, Penang, Malaysia on December 19-20, 2015. On behalf of conference organizers we invite you to attend the conference and present your paper. Date and time of your session will be emailed to you approximately four weeks prior to the conference.

Please complete the following steps at your earliest.

- Fill in the attached registration form and submit your registration fee.
- Each attending participant must complete a separate registration form and submit required registration fee.
- Submit your revised paper according to suggestions of the reviewers and author guidelines.

Please feel free to contact us if you have any query through email by mentioning your manuscript number, we will be happy to assist you. We are looking forward to meet you in wonderful Penang.

Sincerely Yours,



Conference Chair
Dileep Kumar M., PhD





Reviewers Report

Manuscript No.: ICCFMCG-15-219

Manuscript Title: **Effective and Efficiency Program Processing Katonik for Support Community of Entrepreneurship**

Evaluation of the Paper: (1 = excellent) (2 = good) (3 = appropriate) (4 = average) (5 = poor)

Rationale of the Study	1
Title of the Study	1
Abstract	2
Introduction	2
Literature Review	-
Methodology	2
Results and Discussion	2
Conclusion and Recommendations	2
References	-
Technical Quality and Originality	2
Report Writing and Presentation	2

Recommendations: (Mark with √)

Accept without revision:

Requires minor revision: √

Requires moderate revision:

Requires major revision:

Reject submission:

Additional Comments (if any):

- Provide complete references at the end only for running text citation
- Running text citation should be given properly in APA style
- Accepted paper should be formatted using single space, font Cambria, font size 8 and maximum 10-12 single space pages in single column.



Efective and Efisiensi Program Processing Katonik for Support Community of Entrepreneurship

Rahmawati, SE, MS.i, AK.CA
Accounting, Muhammadiyah STIE Palopo
Indonesia

Rahmawati345@yahoo.co.id

Andika Rush, SE
Accounting, Muhammadiyah STIE Palopo
Dhycka99@gmail.com

Abstract

KKN PPM program goal is to provide Value Added for seaweed farmers so that they can process the seaweed into a wide variety of processed foods and beverages. Specific target of KKN PPM program is to provide the motivation and skills in seaweed processing into syrup and knowledge in the packaging and sale of processed products so as to increase the income of local communities. The method used in the KKN PPM program iniyakni by conducting outreach to the local community as well training on seaweed processing katonik into a syrup that is a product of seaweed, as well as providing knowledge on the calculation of cost of the product ready for sale

Program activities KKN-PPM is a socialization program KKN-PPM, in cooperation with two partners, namely services Koperindag to conduct counseling and training to the community, Preparation facilities and infrastructure that supports the implementation of activities, Operationalization which is the stage of determining the success of the program KKN-PPM , as well as the monitoring and evaluation of programs to ensure the sustainability and development of KKN PPM program. Various activities have been carried out in this activity, plan activities that had been prepared previously been possible through the support and help of the community akademika STIE Muhammadiyah and Koperindag Palopo Palopo. In the end, socialization and training will have an impact to the community economy built.

Keywords: Processing, seaweed, garanggang, syrup

1. INTRODUCTION

One of the leading commodity Palopo town is seaweed. South Wara Sub-district is one of the areas of livelihood people are farmers . Rumput sea grass is usually called by the public garanggang Palopo is one of the agricultural products that can be processed into a variety of foods and beverages such as dodol, chips and drinks (syrup). Each of these has unique processing and refined taste. Of the many products that can be produced by seaweed commodities, the most potential to be processed into a quality product and a more easily in seaweed processing syrup. Syrup seaweed is a kind of drink made from primary raw materials are seaweed and other mixtures such as sugar, fruit as a lemon flavoring, and water.

Marine algae (*Eucheuina* sp.) is one of the natural resources of Indonesia. This plant has an important economic value in the cosmetics industry, food and others. Seaweed many processed in dry form after going through the drying process or processed into food ready for consumption, such as: dodol, sweets and drinks. Currently most sold food ready for consumption society is the fruit juice drink, but to drink from seaweed rarely encountered within the community (Nursanto, 2004).

The content of dietary fiber and beneficial nutrients as an antioxidant, antimutagenic, anti-coagulant, anti-tumor, and metabolic sea lipid. Rumput well as the best natural source of iodine (Zada, 2009). The fiber content (diatery fiber) in seaweed are for filling and smooth the body's metabolic processes, so it is very well taken obese. Carbohydrates also difficult to digest, so you feel full longer without fear of obesity and the good fiber in seaweed, Liu Ping (2003), Ying Yong Seng (2015).

Business units to process seaweed into a product is still very rare in the town of Palopo especially Wara South that there has been no attempt seaweed processing directly into a product which is more useful when a potentially establish seaweed business is districts Wara South because the majority of the people are farmers seaweed (Anggadiredja, T 2010).

Generally at the seaweed farmers directly sell their produce directly either wet or dry but if processed further this effort will provide added value to farmers and increase their income.

Responding to Demand

One explanation for the jump in prices is that traders were simply responding to demand from China, with its boost from the Olympics, while supplies from some sources -- notably the Philippines -- weren't available because of bad weather. Another theory is that Chinese food-ingredient companies were engaged in a vicious turf war, with some colluding to drive up the cost of seaweed in order to knock competitors out of the business, A. Charnes, (1978). Yet another view is that speculators and traders saw the midyear surge in crude oil and other commodity prices and figured seaweed would follow, so they filled their warehouses in hopes prices would keep climbing. Whatever the reason, high prices emboldened farmers to rush immature or low-quality seaweed to market, flooding buyers with too much supply. Many farmers say greedy traders made matters worse by mixing raw seaweed with sand or cement to increase the product's weight, and hence its selling price, upsetting buyers in China and sending

prices into a death spiral. Sand, dirt and other contaminants add no value to the seaweed and must be removed to get the carrageenan

Processed seaweed especially in this case seaweed syrup bias to one alternative preparations that can be made by the community, it is in because to make it quite easy and materials required is also not difficult to obtain.

Based on observations made by participants KKN-PPM in the district of South Wara it can be concluded and agreed upon some basic issues such as:

1. Seaweed only in planting, harvesting and crop yields directly sold but not processed directly into a product which is more useful in particular seaweed is processed into syrup
2. There is still a lack of knowledge held by local communities about how to cultivate seaweed katonik into a product, especially syrups seaweed.
3. In addition, there is no business unit to process seaweed into a product that is a syrup seaweed

Based on some of the above problems, it is an established strategy for the settlement of the problem, namely:

1. To motivate local communities by outreach to the local community as well training on seaweed processing katonik into a product that is a syrup seaweed. Education and training is conducted in cooperation with the participants KKN-PPM with two partners, namely service Koperindag Palopo town and the Food Security and counseling Palopo town.
2. Set up one business unit to process seaweed into syrup seaweed, as well as providing training in marketing management product

KKN-PPM is a program that is implemented to provide benefits be felt directly by the people, so that the programs will be undertaken in the process of KKN PPM can contribute to local community life because of which of the various programs are implemented is the appropriate program with the needs of local communities.

There are several outcomes resulting from KKN PPM program that is set up and develop a business unit that processes the seaweed directly into a product that is a syrup seaweed business with the aim of increasing the income of local communities. For the sustainability of the business unit then the resulting product was introduced to the market with labeling and packaging are attractively furnished with the feasibility of consumption of Food and Drug Monitoring Agency.

In addition to the above outcomes, service learning program is expected to have an impact on society. Among others are:

1. Foster the spirit of *entrepreneurship* to society

2. Increased knowledge about the processing of agricultural products seacara directly into a product which is more useful
3. Provide benefits to the economic development of society as a permanent and sustainable.
4. Provide knowledge about calculating the cost of a product ready for sale

2. **METHOD OF EXECUTION**

The method applied is to provide counseling, knowledge and skills in seaweed processing both in manufacturing and in economic aspects

A. **Preparation and Debriefing**

Based on the problems faced by the community after KKN-PPM participant observation, the solution offered in KKN PPM program is the establishment and development of business units. KKN PPM program implemented is the application of science, namely the procedures pengolahn seaweed directly into syrup seaweed and technological processes, packing / packaging and labeling as well as development of product marketing management and sales strategies Seaweed syrup. As for how the seaweed processing into syrup seaweed, namely:

Tools and materials:

- Seaweed katonik with age > 45 days - Wok
- Sugar - Pan
- Fruit as flavorings (Orange)
- Lime
- Lime betel
- Filter (Fabric White)
- Water
- Stove
- How to make:
- Soak seaweed with chalk sirih to inflate so the smell is gone.
- Peel the oranges and separate from the seeds not to get the seeds to avoid the bitter tersisah
- Blender citrus fruit
- Blender seaweed soaked and expands teelah then enter lime juice to taste
- Ripe oranges that are already in the blender and then filtered
- Cook the seaweed that has been in the blender and then filtered
- Combine the citrus fruit that has been filtered by seaweed that has filtered into the pot and then enter the sugar as much as 1 kg with 600 mL of water. Then cook until cooked and sugar dissolves
- After cooking strain the back and enter it into the bottle.

This is very important because the problems faced by the public due to lack of knowledge and equipment to support the production process.

Packing / packaging products need to be qualified in order that the product quality is also bagus. Labeling initial display seen by consumers or potential consumers, so as to attract consumers need an attractive label. For processing of seaweed most important for increasing value added for seaweed and give profit for entrepreneurship (Wibowo, Lukas, 2012).

B. Implementation

The measures undertaken in the implementation of KKN PPM program are:

1. Socialization program KKN-PPM
2. Cooperation with two partners namely Koperindag department and the Food Security and Guidance Palopo town to conduct counseling and training to the community
3. Preparation of facilities and infrastructure that supports the implementation of activities
4. The operation of which is a determinant of the success of the program stages KKN-PPM
5. Monitoring and evaluation of programs to ensure the sustainability and development of KKN PPM program.

Implementation of KKN PPM activities program is implemented through the cooperation and participation of the community and some of the partners involved. In addition to participation as a target group or participants in a training program that will be implemented in the KKN-PPM. Communities and partners also participated in the preparation of tools and materials available pengolahanyang location.

3. RESULTS AND DISCUSSION

KKN PPM program implementation as the initial goal of researchers to empower people to improve their economy. Cooperation with communities and partners is done in order to smooth this program. Some activity has been is implemented with the help and participation of various parties, namely the community Muhammadiyah STIE Palopo, community and government Palopo represented Koperindag. The results achieved in this program include:

1. The formation of student groups in the framework of the implementation of KKN PPM program.
2. Implementation of the establishment of the group - a group of people who will be trained in the implementation of the program
3. Implementation of training to local community groups about seaweed processing katonik into a product that is a syrup seaweed. Counseling and training

Participants was conducted in cooperation with the KKN PPM service Koperindag Palopo town. This implementation is accompanied by training syrup seaweed.

4. The establishment of business units in communities with meny edikan equipment in making syrup seaweed and other supporting equipment such as plastic containers and bottles, as well as machines that assist in the packaging syrup seaweed so attractive and salable.
5. KKN PPM progress report creation and implementation of the Internal Monitoring
6. Monitoring and evaluation of the continuation of the work done by the partners on the training that had been given previously.
7. Preparation of publications and external monitoring.

4. CONCLUSION

KKN PPM program into the container in order to realize the tri dharma college. Where universities can be partners for Soceaty. its functions is to help the community in order to empower the community in improving the economy. Through this program, teams and student groups provide training and counseling in order to manage / syrup seaweed.

Implementation of this program of course with the help of the Koperindag and perguruan fully supports. Ranging from preparation to implementation. Preparations have been done much earlier but for the implementation is done after signing the contract with the Higher Education / Kopertis the parties in June 2015. The reports that it has recently achieved some results previously described in chapter 5. The bebearpa we expect the achievement of these activities can be a member benefit to society , students and for the author himself.

Suggestion that could be given that, with future programs can be developed something that remains a positive impact on society or the direct touch to the local community, especially to skim devotion. Universities thus functions not only as an academic, but are also useful in society.

Reference

Anggadiredja, T., Zalnika, A., Purwoto, H., dan Istini, S. (2010). *Rumput Laut*. Jakarta: Penebar Swadaya.

A.Charnes, (1978), Measuring The Efficiency of decision Making, European Journal

Li U Ping, (2003), On Planning Methods of Sustainable Ecology Enviromental Management in Mining Area

- Indriani, H. dan Sumiarsih, E. (1999). *Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Rumput laut*. Jakarta: Penebar Swadaya. Hal. 43
- Istiani, S, Zalnika A, Suhaimi, dan Anggadireja J. *Manfaat dan Pengolahan Rumput Laut*. Jurnal Penelitian. Jakarta: BPPT
- Ying Yong Sheng, (2015), 26(2):349-355), Effect of Timber Moisture Content and Terrain Conditions on The Decay Degree of Korean, *Journal ecology*
- Winarno. (1990). *Teknik Pengolahan Rumput Laut*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Wibowo Lukas, Evi Fitriyani, *Pengolahan Rumput Laut (Eucheuma Cottoni) Menjadi Serbuk Minuman Instan*, 2012, Jurnal Penelitian, Pontianak
- ZHU You Wei at all, 2009, The Emperical Research on R&D Efficiency of Chinese High-Tech Industry
- Anonim, <http://aryacorrec.blogspot.com/> di akses tanggal 18 April 2014